

4. Petujuk Pengisian Persyaratan Permohonan Rekomendasi B3 (Penambahan Jenis B3)

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkutan
Bahan Berbahaya dan Beracun
(Penambahan Jenis B3)

Kota, Tanggal Pengajuan

Kepada Yth,
Menteri Lingkungan Hidup
/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
up. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun
di
Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan data sebagai berikut :

I. KETERANGAN IDENTITAS PEMOHON

1.	Nama pemohon	:	 Diisi nama lengkap orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengajuan permohonan rekomendasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
2.	Jabatan	:	 Diisi dengan nama jabatan pemohon Contoh: Presiden Direktur/Direktur Utama/Direktur
3.	Alamat	:	 Diisi alamat lengkap tempat tinggal pemohon (sesuai dengan KTP/identitas lainnya
4.	Nomor Telepon/ HP	:	 Diisi dengan nomor telepon/HP yang bisa dihubungi
5.	Alamat email	:	 (cukup jelas)

II. KETERANGAN IDENTITAS PERUSAHAAN:

1.	Nama Perusahaan	:	 Diisi dengan nama perusahaan yang berbentuk badan hukum Indonesia yaitu : a. Badan usaha milik negara b. Badan usaha milik daerah c. Perseroan Terbatas, atau d. Koperasi (sesuai dengan pasal 79 ayat (2) PP 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan) dan Pasal 42 ayat (2) PM: 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
----	-----------------	---	---

		Catatan : Bila perusahaan merupakan Kepemilikan Modal Asing , maka untuk angkutan barang moda darat (termasuk angkutan barang berbahaya) sesuai Lampiran II Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014 adalah perusahaan dengan kepemilikan modal asing maksimal 49% .
2.	Alamat Kantor	: Diisi dengan alamat perusahaan secara lengkap, mencakup nama kawasan (jika ada), nama jalan, nomor, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan kode pos sesuai dengan surat domisili perusahaan. Alamat perusahaan harus sesuai dengan yang tertulis di NIB. Contoh: Kawasan MM2100, Jl. Pulau Buton Blok B 7, Kel. Ganda Mekar, Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Jawa Barat 17520
3.	Nomor Telepon	: Diisi dengan nomor telepon yang bisa dihubungi
4.	Alamat Pool Kendaraan	: Diisi dengan alamat pool secara lengkap dimana kendaraan pengangkut B3 berada, dapat diisi lebih dari 1 alamat pool (jika ada)
5.	Nomor Telepon pada Pool Kendaraan	: Diisi dengan nomor telepon/HP yang bisa dihubungi
6.	Bidang Usaha	: Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yaitu: Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432)

III. PERSYARATAN ADMINISTRASI (DOKUMEN DILAMPIRKAN)

1.	NIB (Nomor Induk Berusaha)	: Diisi dengan nomor NIB dan tanggal penerbitan (Dilampirkan dokumen NIB beserta Lampiran Dokumen yang memuat kode KBLI 49432)
2.	Copy SDS (Safety Data Sheet) / LDK (Lembar Data Keselamatan)	: - Dokumen SDS untuk setiap bahan kimia yang diangkut berasal/dibuat oleh produsen B3 tersebut; Dokumen SDS / LDK wajib berbahasa Indonesia (Aturan kewajiban tertuang pada Pasal 10 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2013); dan - SDS/LDK yang dilampirkan harus memuat sedikitnya 16 informasi (sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 23/M-IND/PER/4/2013 tentang Sistem Harmonisasi Global Klasifikasi dan Label Pada Bahan Kimia) yaitu: - Identifikasi bahan (tunggal atau campuran) dan Perusahaan Penanggung jawab; - Identifikasi Bahaya; - Komposisi/ informasi tentang kandungan bahan penyusun senyawa kimia; - Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan - Tindakan pemadam kebakaran; - Tindakan penanggulangan tumpahan dan kebocoran; - Penanganan dan penyimpanan; - Kontrol paparan/ perlindungan diri; - Sifat fisika dan kimia; - Stabilitas dan reaktivitas;

			11) Informasi Toksikologi; 12) Informasi Ekologi; 13) Pembuangan limbah; 14) Informasi pengangkutan; 15) Informasi yang berkaitan dengan regulasi; dan 16) Informasi lainnya
3.	Copy surat rekomendasi pengangkutan B3 sebelumnya	:	Surat Rekomendasi Pengangkutan B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang pernah diperoleh sebelumnya (selain pengajuan permohonan baru)
4.	Bukti penerimaan dokumen pelaporan pengangkutan B3 (untuk perusahaan yang telah menerima surat Rekomendasi Pengangkutan B3 sebelumnya)	:	Bukti penerimaan dokumen pelaporan melalui PILAR B3
5.	Copy SK Dirjen Perhubungan Darat / Izin Pengangkutan B3 sebelumnya	:	Copy SK Dirjen Perhubungan Darat / Izin Pengangkutan B3 (selain permohonan baru)

IV. KETERANGAN IDENTITAS ALAT ANGKUT B3

No.	No. Polisi Kendaraan	Merk/ Model Kendaraan	Tahun Pembuatan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan
1						
2						
dst						

V. KETERANGAN JENIS B3 YANG DIANGKUT

No	Nama Dagang	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Klasifikasi B3	Fasa B3 (Padatan, Pasta, Serbuk, Serat, Cair, Gas)	Jenis Kemasan	Asal Muat B3	Tujuan Bongkar B3	Tujuan Penggunaan B3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Xylene	Xylene	1330-20-7	Mudah menyala, Berbahaya, Iritasi	Cair	Drum dan tangki	PT. ABCD, Jakarta	PT. XYZ, Surabaya, Jawa Timur	Sebagai bahan baku pembuatan resin, thinner dan cat
2									
dst									

Keterangan :

- CAS Number : Chemical Abstract Service Number.
- Karakteristik B3 : diisi sesuai SDS (Safety Data Sheet) B3 masing-masing.
- Nama Bahan Kimia dan CAS Number yang tercantum di Lampiran PP 74 Tahun 2001.
- Asal muat B3 : diisi nama perusahaan (tidak boleh disingkat) dan lokasi perusahaan tersebut berada.
- Tujuan bongkar B3 : diisi nama perusahaan tujuan akhir (tidak boleh disingkat) dan lokasi perusahaan tersebut berada.
- Tujuan Penggunaan B3 : harus dijelaskan secara rinci untuk apa B3 tersebut digunakan pada masing-masing perusahaan tujuan bongkar.

VI. IDENTITAS PENGURUS PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKUTAN B3

1.	Nama	:	 Diisi nama yang mengurus permohonan rekomendasi
2.	Jabatan	:	 Diisi jabatan pada perusahaan pemohon
3.	Nomor HP	:	 Diisi dengan nomor HP aktif yang dapat dihubungi
4.	Alamat Email	:	 Cukup jelas

Semua dokumen yang saya sampaikan adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam dokumen yang disampaikan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanda tangan pemohon
Diatas materai 10.000
dan stempel perusahaan

(Nama Pemohon)
(Jabatan Pemohon)